



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I 2026

LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

TIM PENYUSUN :

Penanggung Jawab : **Aliruddin, ST**
Plt. Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Ketua : **M. Ahda Rifqi Hanief, S.Pi**
Perencana Ahli Pertama

Anggota : **Amrin Hakim, S.Pi**
Penelaah Teknis Kebijakan

Kontributor : Seluruh anggota tim kerja LPTK

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Alamat: Jl. Ir. Soekarno nomor 03. Wakatobi
Sulawesi Tenggara
e-mail : lptk.wakatobi@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya memberikan inspirasi dan semangat untuk menyelesaikan Laporan Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Triwulan I Tahun 2026. Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan DIPA Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan pada periode Triwulan I Tahun Anggaran 2026 dengan metode penyajian mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi.

Pengelolaan kinerja sebagaimana pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 terdiri atas a) perjenjangan kinerja; b) perencanaan Kinerja; c) pengukuran Kinerja; d) pelaporan Kinerja; dan e) evaluasi Kinerja. Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini merupakan bagian dari pelaporan Kinerja tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan kinerja. Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja berkewajiban menyelenggarakan SAKIP dan pelaksanaannya disusun dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). LKj merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan a) rencana strategis; b) perjanjian Kinerja; c) pengukuran Kinerja; d) pengelolaan data Kinerja; e) pelaporan Kinerja; dan f) reviu dan evaluasi Kinerja. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good governance) dapat diwujudkan.

Laporan Kinerja ini memberikan informasi kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang terukur atas capaian pada periode Triwulan I Tahun 2026 dan menjadi bahan perbaikan bagi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya pada periode berikutnya. Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Kegiatan (IK) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2026 yang merupakan kontrak kinerja tahunan.

Akhirnya, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi dari pihak yang turut mendukung penyusunan laporan kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan ini, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode tahun berikutnya, walaupun masih terdapat kekurangan dalam penyajian dan sistematika penyusunannya. Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridho-Nya atas semua upaya yang dilakukan.

Wakatobi, 20 April 2026

Pt. Kepala LPTK,



DAFTAR ISI

	Halaman
Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Ringkasan Eksekutif	xi
BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan	3
1.3. Tugas dan Fungsi	3
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)	4
1.5. Sistematika Laporan	5
1.6. Potensi dan Permasalahan	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis	9
2.2. Rencana Kerja Tahun 2026	12
2.3. Perjanjian Kinerja (PK)	12
2.4. Pengukuran Kinerja	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1. Prestasi Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026	16
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	16
3.3. Akuntabilitas Keuangan Triwulan I Tahun 2026	24
BAB IV. PENUTUP	38
4.1. Simpulan Capaian Kinerja Organisasi.....	39
4.2. Upaya Perbaikan Kedepan.....	39
4.3. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKj.....	39
Lampiran	40
- Perjanjian Kinerja	
- SK Tim Pengelola Kinerja/Penyusun LKj.....	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Target Kinerja LPTK Tahun 2025-2029	11
2. Rencana Kerja LPTK Tahun 2026	12
3. Perjanjian Kinerja LPTK Tahun 2026	13
4. Target dan Capaian Kinerja LPTK Triwulan I Tahun 2026	17
5. Capaian Kinerja IK 1 pada Triwulan I Tahun 2026	18
6. Capaian Kinerja IK 6 pada Triwulan I Tahun 2026	22
7. Capaian Kinerja IK 9 pada Triwulan I Tahun 2026	24
8. Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2026	25
9. Pagu dan Realisasi Anggaran per Rincian Output Triwulan I Tahun 2026	25
10. Pagu dan Realisasi Anggaran per IK Triwulan I Tahun 2026	26
11. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKj	39

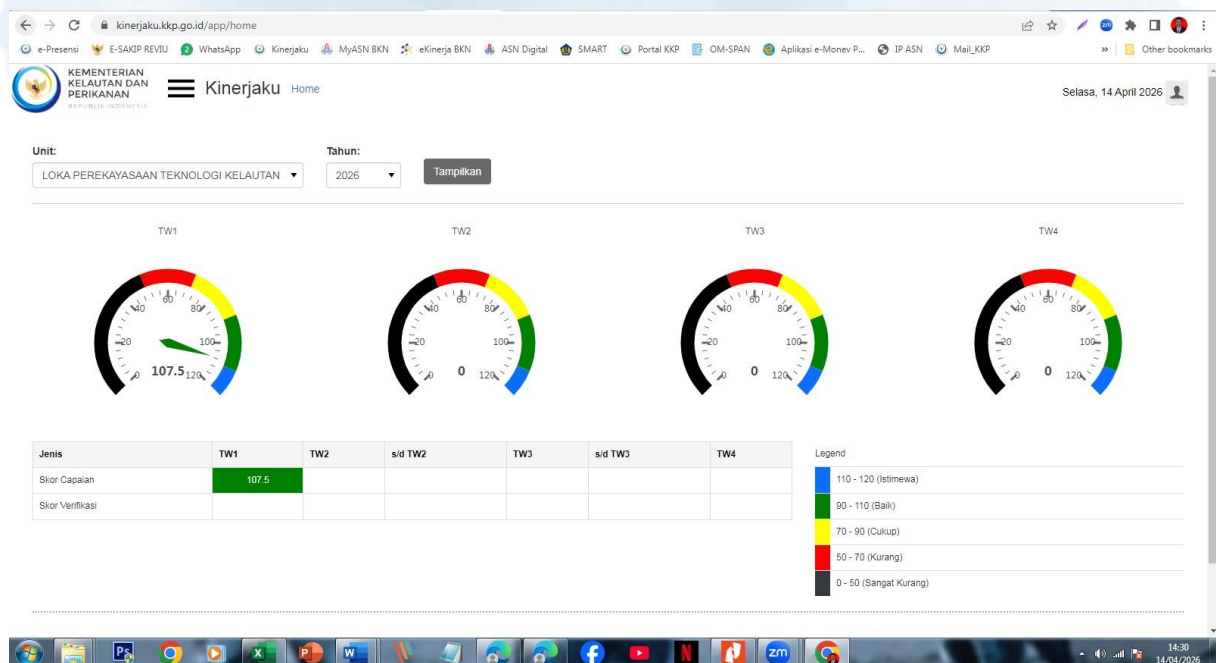
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Dashboard Capaian Kinerja LPTK Triwulan I Tahun 2026	vii
2. Struktur Organisasi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	4
3. Komposisi SDM Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	5
4. Rincian ASN Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	5
5. Status Indeks Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	14
6. Dashboard Kinerjaku LPTK Triwulan I Tahun 2026	16

RINGKASAN EKSEKUTIF

Loka Perencanaan Teknologi Kelautan (LPTK) sebagai Unit Pelaksana Teknis *eks-ri-set* dibawah koordinasi Sekretariat Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang kini menjalankan tugas dan fungsi manajerial dan masih memberikan layanan berupa sosialisasi dan diseminasi hasil riset yang telah dilakukan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP, LPTK menyusun Laporan Kinerja interim dan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Pada Triwulan I Tahun 2026 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja (PK) antara LPTK dengan Sekretariat BPPSDMKP yang memuat 1 (*satu*) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 10 (*sepuluh*) Indikator Kinerja (IK) dengan dukungan anggaran sebesar Rp.4.074.775.000,- guna mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja LPTK Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical frame work* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan aplikasi Kinerjaku tersebut, diperoleh data capaian kinerja LPTK pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 107,5% sebagaimana dashboard kinerjaku berikut:



Gambar 1. Dashboard Capaian Kinerja LPTK Triwulan I Tahun 2026
Sumber: Aplikasi Kinerjaku Triwulan I Tahun 2026 (www.kinerjaku.kkp.go.id)

Dari 10 IK, terdapat 3 IK yang mempunyai target capaian pada Triwulan I tahun 2026. Adapun rincian capaian dari masing-masing Indikator Kinerja (IK) tersebut adalah sebagai berikut:

IK-1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%) dengan target sebesar 86% dan capaian 86% atau persentase capaian sama dengan 100%;

IK-6 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%) dengan target sebesar 77 dengan capaian sebesar 100 atau sama dengan 120%;

IK-9 Persentase Dukungan Manajemen Teknis Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%) dengan target sebesar 100 dengan capaian sebesar 100 atau sebesar 100%

Secara umum, pencapaian kinerja LPTK pada Triwulan I Tahun 2026 adalah baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja, yang dapat tercapai semuanya, bahkan beberapa melebihi target yang ditetapkan. Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran LPTK pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp. 785.368.068,- dari pagu anggaran Rp. 4.074.775.000,- (19,27%).

Guna mewujudkan kinerja yang optimal dan memenuhi target yang telah ditetapkan, sejumlah rekomendasi yang perlu mendapat perhatian diantaranya :

1. Monitoring Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja yang memiliki target triwulanan maupun tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatannya. Penanggung jawab IK agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

2. Verifikasi Capaian Indikator

Dalam rangka akuntabilitas atas capaian IK, kegiatan verifikasi perlu dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa capaian yang diklaim sesuai bukti dukung yang ada, disamping itu verifikasi penting dilaksanakan agar pengukuran dan pelaporan kinerja dapat dilakukan secara disiplin dan tepat waktu.

3. Pelaporan Kinerja

Dalam rangka akuntabilitas atas implementasi SAKIP, kegiatan penyusunan laporan kinerja perlu disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana harus terdapat unsur perbandingan antar satker sejenis K/L dan sebagai tindak lanjut rekomendasi atas penilaian SAKIP ditahun sebelumnya, dengan memastikan tim pengelola/penyusun laporan kinerja untuk menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level kementerian/level unit kerja lingkup BPPSDMKP.

4. Pelaksanaan kegiatan sebaiknya mengikuti RPD yang telah dibuat agar realisasi anggaran tiap bulannya dapat terserap sesuai rencana serta meminimalisir deviasi halaman III DIPA.



BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG**
- 1.2. TUJUAN**
- 1.3. TUGAS DAN FUNGSI**
- 1.4. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUASIA**
- 1.5. SISTEMATIKA LAPORAN**
- 1.6. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden (PERPRES) No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan laporan kinerja yaitu, bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja berkewajiban menyelenggarakan SAKIP dan pelaksanaannya disusun dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan : a) rencana strategis; b) perjanjian kinerja; c) pengukuran kinerja; d. pengelolaan data kinerja; e) pelaporan kinerja; dan f) reviu dan evaluasi kinerja. Laporan Kinerja juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good governance) dapat terwujud.

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Triwulan I Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.2. Tujuan

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan:

1. Memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerja LPTK pada periode Triwulan I Tahun 2026.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi satuan kerja untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. Tugas dan Fungsi

Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan, yang selanjutnya disebut LPTK, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertanggung jawab kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP). LPTK memiliki tugas melakukan perekayasaan teknologi kelautan dalam rangka mendukung visi BPPSDM KP, yakni sebagai Inovator IPTEK dan Motivator Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan.

Kegiatan perekayasaan yang dilakukan oleh LPTK diarahkan untuk menjalankan fungsi pengembangan institusi, menciptakan inovasi dan pengembangan teknologi yang dilakukan melalui kerjasama lintas instansi, baik pemerintah maupun swasta. Sebagai institusi riset dibawah BPPSDM KP, LPTK bertugas melakukan perekayasaan dibidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. LPTK berkomitmen untuk mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam merencanakan program kerjanya sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.40/Men/2011 yang diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85/Permen-KP/2020 yaitu: a) penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta laporan dibidang perekayasaan teknologi kelautan; b) pelaksanaan perekayasaan teknologi kelautan di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; c) pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama perekayasaan teknologi kelautan dibidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan d) pelaksanaan urusan ketatausaha.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, LPTK dibantu oleh unit kerja dibawahnya yang terdiri dari: a) Urusan Umum; b) Koordinator dan; c) Kelompok Jabatan Fungsional. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Adapun struktur organisasi LPTK dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



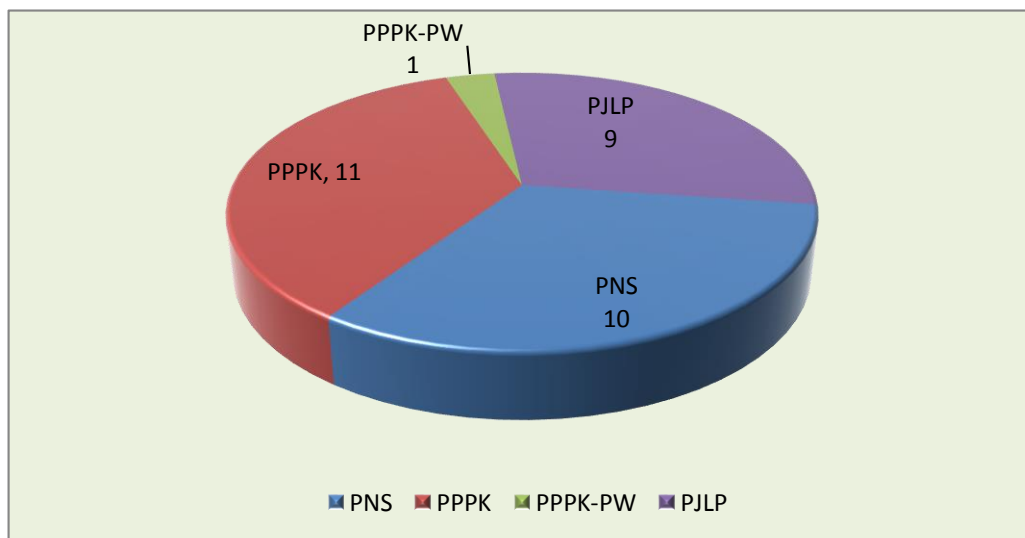
Gambar 2. Struktur Organisasi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Sejalan dengan perkembangan, pada tanggal 24 Agustus 2021 setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyebutkan bahwa tugas, fungsi dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN (tertuang dalam Pasal 65 ayat 1) sehingga LPTK tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan fungsi riset.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Triwulan I Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 206 Tahun 2024 Tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPPSDM, LPTK selaku UPT eks-riset kini dibawah koordinasi Sekretariat BPPSDM KP, dimana sebelumnya LPTK dibawah koordinasi Pusat Riset Kelautan. Adapun pada PermenKP tersebut terdapat satu pusat baru di lingkungann BPPSDMKP yaitu Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Kelautan dan Perikanan, dan LPTK direncanakan akan menjadi bagian dari pusat tersebut. Sampai saat ini LPTK mengampu tusi manajerial dengan kegiatan dukungan manajerial selain itu juga LPTK menjalankan kegiatan penyelenggaraan layanan public yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah sumberdaya manusia LPTK sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebanyak 31 personil yang terdiri atas 21 Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri atas 10 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 11 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK (10 orang merupakan PPPK baru yang terangkat pada Oktober 2025), 1 orang PPPK Paruh Waktu dan 9 orang PJLP. Dari 21 ASN yang ada, 1 pegawai menduduki jabatan Struktural, 4 pegawai Jabatan Fungsional Tertentu serta 16 pegawai adalah Jabatan Fungsional Umum. Adapun jumlah ASN Laki-laki sebanyak 15 orang dan perempuan sebanyak 6 orang. Komposisi dan Keragaan SDM LPTK pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. Komposisi SDM Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Triwulan I Tahun 2026



Gambar 4. Keragaan ASN Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2022-2026

1.5. Sistematika Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Tahunan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Kelautan dan Perikanan pada Triwulan I Tahun 2026, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (*performance results*) Triwulan I Tahun 2026 terhadap rencana kinerja (*performance plans*) Triwulan I Tahun 2026. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di tahun berikutnya. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian laporan kinerja adalah sebagai berikut:

- Kata Pengantar, menyajikan pengantar laporan;
- Ringkasan Eksekutif, berisi ringkasan dari laporan, meliputi: uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja, dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja;
- Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi;
- Bab II Perencanaan Kinerja, berisi uraian singkat tentang Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun Berjalan, serta Pengukuran Kinerja;
- Bab III Akuntabilitas Kinerja
Capaian Kinerja Organisasi
Berisi capaian kinerja dari indikator- indikator kinerja telah ditetapkan. Untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang meliputi:
 - a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan;
 - b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
 - d. Membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan unit kerja yang lain yang setara di kementerian;
 - e. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan dan peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah di lakukan;
 - f. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - g. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dan pencapaian pernyataan kinerja.
 Realisasi Anggaran
 Uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- Bab IV Penutup, Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- Lampiran, Berisi Perjanjian Kinerja atau dokumen pendukung lainnya.

1.6. Potensi dan Permasalahan

A. Potensi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LPTK didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya fisik dan sumber daya teknologi. Sumber daya fisik berupa aset kantor yang meliputi gedung bangunan kantor, gedung pelayanan publik serta instalasi radar *AIS base station*. Instalasi radar LPTK sampai saat ini merupakan aset yang krusial yang masih berfungsi sebagai sarana pengawasan lalu lintas di perairan Wakatobi. Sumber daya manusia terdiri atas jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, jabatan fungsional umum. Keberadaan sumber daya dan lptek memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan.

B. Permasalahan

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Perekayasaan Teknologi Kelautan berkenaan dengan kebijakan tingkat nasional yang menyatukan kegiatan riset sehingga menyebabkan perubahan mendasar pada organisasi yang melaksanakan riset. Terbitnya peraturan Presiden No 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengambil alih tugas dan fungsi riset di kementerian dan lembaga sehingga kegiatan riset LPTK menjadi tidak lagi dapat dilaksanakan sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini dan selama organisasi baru belum terbentuk. Sehingga unit kerja yang memiliki tugas riset sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini hanya melaksanakan kegiatan kinerja dukungan manajerial dan penyelenggaraan layanan publik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.2. RENCANA KERJA TRIWULAN I TAHUN 2026

2.3. PERJANJIAN KINERJA

2.4. PENGUKURAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Pelaksanaan kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) BPPSDMKP Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025-2029, dengan memiliki peran strategis dalam mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden. KKP berkomitmen untuk mendukung tujuh dari delapan Asta Cita, dengan focus pada Misi Asta Cita ke-2,5, dan 8. Misi tersebut dirumuskan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
3. Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita

Dari Keempat tersebut LPTK berkonstruksi mendukung Misi Ke-4 karena LPTK menjalankan tugas dan fungsi Manajerial.

A. Visi

Visi disusun berdasarkan visi Indonesia 2045 yaitu “Mewujudkan Indonesia sebagai Negara yang berdaulat, adil dan makmur”. Selaras dengan itu, Visi Presiden dan Wakil Presiden RI dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sebagai instansi yang mendukung Presiden dalam urusan kelautan dan perikanan, KKP menetapkan misi sebagai berikut: “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Emas 2045”

Sejalan dengan visi nasional dan kementerian, BPPSDMKP merumuskan visi spesifik, yaitu “Terwujudnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.”

Visi yang ditetapkan LPTK masih mengacu PermenKP Nomor 85 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yaitu “Menjadi Inovator IPTEK Bidang Konservasi dan Pengawasan Untuk Pengelolaan Sumberdaya Kelautan yang Berkelanjutan”. Adapaun perubahan visi menunggu SOTK baru terbit.

B. Misi

Dalam melaksanakan misi KKP ke-3 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”. Dalam dukungan terhadap pelaksanaan misi tersebut, BPPSDMKP menetapkan misi yaitu “Mewujudkan SDM Kelautan dan Perikana yang Inovatif, Kompeten dan Berdaya Saing ditingkat Nasional dan Internasional”.

LPTK yang ditetapkan LPTK masih mengacu PermenKP Nomor 85 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yaitu sebagai berikut:

- a. Menguasai Iptek kelautan untuk konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Menghasilkan Iptek kelautan untuk konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan;
- c. Menerapkan, memanfaatkan dan menyebarluaskan iptek hasil litbang untuk kepentingan masyarakat.

Adapaun perubahan misi menunggu SOTK baru terbit.

C. Tujuan

Untuk mewujudkan Misi BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2026-2029 disusun tujuan yaitu “Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM KP yang Inovatif, Kompeten dan Berdaya Saing” dengan Indikator meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KP dari 70 pada Tahun 2025 menjadi 79 pada tahun 2029. Tujuan yang ditetapkan LPTK masih mengacu PermenKP Nomor 85 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yaitu Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial riset kelautan sesuai tata pemerintahan yang baik. Adapaun perubahan tujuan menunggu SOTK baru terbit.

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat tercapai oleh KKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP terdiri dari:

- SS-1 Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut
- SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- SS-3 Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional
- SS-4 **Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan**
- SS-5 **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas**

Dengan memperhatikan misi KKP dan tujuan BPPSDM Tahun 2025-2029, maka sasaran program (SP) yang akan dicapai BPPSDM pada Tahun 2025-2029 mengacu pada sasaran strategis KKP adalah sebagai berikut:

SP-1 Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

SP-2 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP

Dengan memperhatikan misi dan tujuan LPTK Tahun 2025-2029 mengacu pada sasaran strategis KKP, dan sasaran program BPPSDMKP, maka sasaran kegiatan yang diturunkan ke LPTK yaitu; **SK-1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.** Dengan mengacu pada sasaran kegiatan Sekretariat BPPSDMKP yang telah diturunkan (Cascading) ke level 3, maka sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan LPTK Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%) dengan target sebesar 86%;

2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (Nilai) dengan target sebesar 92 dengan capaian sama dengan 92,1;
3. Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (Nilai) dengan target sebesar 80;
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (Nilai) dengan target sebesar 71,75;
5. Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks) dengan target sebesar 83;
6. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%) dengan target sebesar 77;
7. Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK (Proposal) dengan target sebesar 1;
8. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK (Nilai) dengan target sebesar 71
9. Persentase Dukungan Manajemen Teknis Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%) dengan target sebesar 100; dan
10. Keterbukaan Informasi Publik LPTK (Nilai) sebesar 70

Sebagai acuan sementara menggunakan Rancangan Indikator dan Target Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2025-2029 yang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1. Target Kinerja LPTK 2025-2029

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025-2029				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	85	86	87	88	89
			2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (Nilai)	92	92,1	92,15	92,2	92,2
			3	Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (Nilai)	80	80,25	80,50	80,75	81
			4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (Nilai)	71,5	71,75	72	72,25	72,5
			5	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	83	83	84	84	85
			6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%)	80	81	82	83	84
			7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LPTK (%)	80	81	82	83	84
			8	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK (Proposal)	1	1	1	1	1
			9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK (Nilai)	80	81	82	83	84
			10	Persentase Dukungan Manajemen Teknis Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%)	100	100	100	100	100

2.2. Rencana Kerja Tahun 2026

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran strategis BPPSDMKP, Rencana Kerja LPTK Tahun 2026 menetapkan 1 (satu) Sasaran Kegiatan yaitu” Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Pencapaian sasaran tersebut diukur menjadi 10 (sepuluh) indikator kinerja, adapun dukungan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Dukungan Anggaran LPTK Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	4.074.775.000

Pada Triwulan I Tahun 2026 total anggaran LPTK adalah sebesar Rp. 4.074.775.000,- (*Empat milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) yang terdiri atas 3 (*tiga*) Klasifikasi Rincian Output yang memuat 10 (*sepuluh*) Rincian Output (RO) yaitu: 1)Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden, 2) Layanan Umum, 3) Layanan Perkantoran, 4) Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, 5) Layanan BMN, 6) Layanan Manajemen SDM, 7)Layanan Pemantauan dan Evaluasi, 8) Layanan Manajemen Keuangan.

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka dibuat Perjanjian Kinerja LPTK Triwulan I Tahun 2026 yang telah menerapkan/menggunakan manajemen kinerja dengan yang berisi langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberi arah bagi para penanggung jawab kegiatan dalam melaksanakan tugas.

Perjanjian Kinerja LPTK level 3 dibuat sebagai pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi yang diturunkan dari rencana kerja Tahun 2026 kementerian dan program BPPSDMKP.

Dokumen perjanjian kinerja memuat informasi tentang program, sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta alokasi anggaran per tahun. Pada Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 LPTK telah menetapkan rencana untuk merealisasikan 1 Sasaran Kegiatan yang terdiri atas 10 (sepuluh) Indikator Kinerja sebagai penjabaran atas sasaran kegiatan Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 4.074.775.000,-

Adapun Indikator Kinerja dan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja LPTK Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	86
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (Nilai)	92,1
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (Nilai)	80
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (Nilai)	71,75
		5.	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	83
		6.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%)	77
		7.	Proposal Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK (Proposal)	1
		8.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK (Nilai)	71
		9.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%)	100
		10.	Keterbukaan Informasi Publik LPTK (Nilai)	70

2.4. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IK) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat tercapai.

Pengukuran capaian kinerja LPTK Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada masing-masing Indikator Kinerja sehingga akan diperoleh indeks capaian Indikator Kinerja. Perhitungan indeks capaian Indikator Kinerja perlu memperhitungkan jenis polarisasi Indikator Kinerja yang berlaku

yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian Indikator Kinerja adalah :

- 1) Angka maksimum adalah 120;
- 2) Angka minimum adalah 0;
- 3) Formula perhitungan indeks capaian IKK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- 4) Status indeks capaian IKK adalah sebagai berikut :



Gambar 5. Status Indeks Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah : Maximize adalah Semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Minimize adalah Semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Stabilize adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IK pada masing-masing Indikator yang ada dalam Perjanjian Kinerja. Adapun metode pengukuran kinerja dilakukan secara berkala tiap triwulan serta tahunan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh tim yang melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja. Tahapan akhir dari proses ini adalah verifikasi dan validasi capaian kinerja, untuk memastikan kesesuaian antara capaian yang dilaporkan di aplikasi Kinerjaku dan data dukung yang dilampirkan oleh satker.

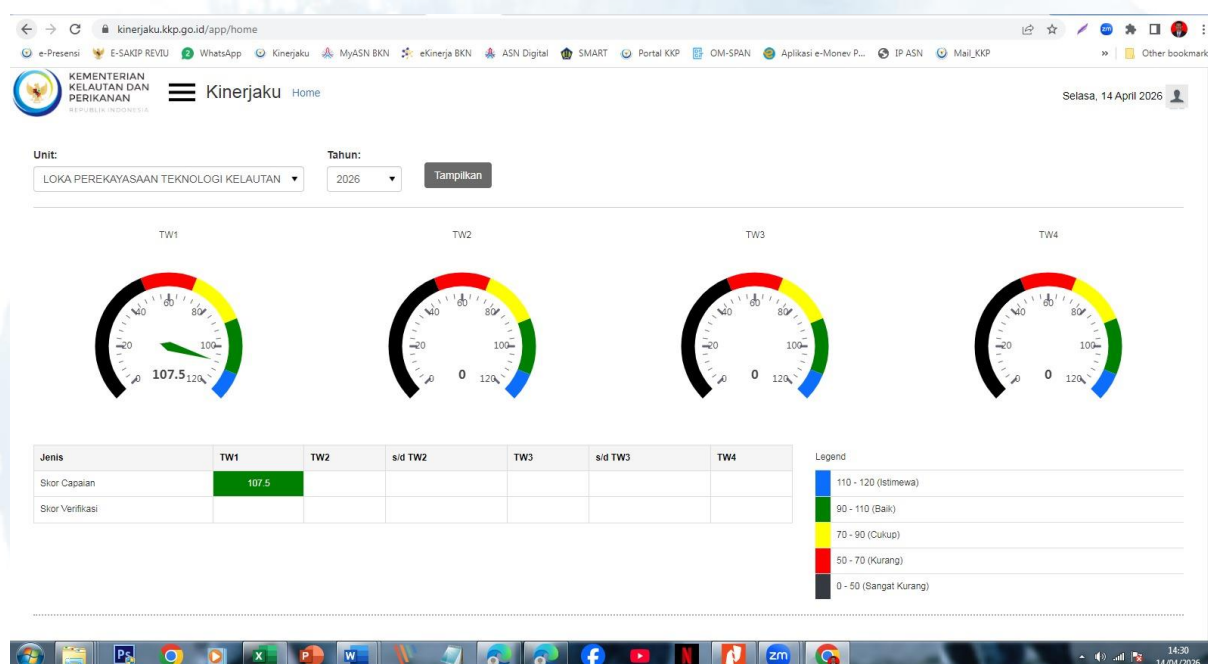
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. PRESTASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2
- 3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
- 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN TRIWULAN I TAHUN 2026

3.1. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2026

Pencatatan dan Pengukuran capaian kinerja LPTK Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical frame work* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh nilai capaian kinerja LPTK Triwulan I Tahun 2026 sebesar 107,50% sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 6. Dashboard Kinerjaku LPTK Triwulan I Tahun 2026

Dari hasil pengukuran kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat diketahui bahwa capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan dengan nilai kinerja baik yang ditunjukkan dengan indikator berwarna hijau. Pada Tahun 2026, LPTK memiliki tanggungjawab untuk merealisasikan 1 Sasaran Kegiatan yang memuat 10 Indikator Kinerja Kegiatan (IK). Dari 10 IK tersebut 3 (tiga) IK yang memiliki target capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, yaitu IK 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%) target 86 capaian 86 (100%); IK 6) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%) target 77 capaian 100 (120%); dan IK 10) Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%) target 100 capaian 100 (100%)

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi LPTK. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IK) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran kegiatan dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 dapat tercapai.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada masing-masing sasaran kegiatan menunjukkan kinerja baik (mencapai target yang telah ditetapkan) yang ditandai dengan warna biru dan hijau sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. Target dan Capaian Kinerja LPTK Triwulan I Tahun 2026

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TAHUN 2026	TRIWULAN I 2026		%
					TARGET	REALISASI	
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	86	86	86	100,00%
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (Nilai)	92,1			
		3	Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (Nilai)	80			
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (Nilai)	71,75			
		5	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	83			
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%)	77	77	100	120,00%
		7	Proposa Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK (Proposal)	1			
		8	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK (Nilai)	71			
		9	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%)	100	100	100	100,00%
		10	Keterbukaan Informasi Publik LPTK (Nilai)	70			

Rincian pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IK) pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

SK 1 : Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) IK sebagai berikut :

IK 1 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan sampai dengan waktu pengukuran.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja LPTK Triwulan I Tahun 2026 ditetapkan target IK ini adalah persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LPTK sebesar 86%. Capaian IK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Capaian Kinerja IK 1 pada Triwulan I Tahun 2026

SK-1		Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan							
IK-1		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)							
Realisasi Triwulan I 2023 - 2025			Tahun 2026					Target Kinerja 2025-2029	
2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan TW I Tahun 2025-2026	Target 2029	% Capaian
75	82	85	86	86	86	100,00%	1,18%	89	96,63%

Pada Triwulan I Tahun 2026 capaian IK ini telah mencapai target yang ditetapkan, yakni persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LPTK sebesar 86% dari target 86%, atau dengan presentase capaian sebesar 100%. Capaian IK ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 85%. Capaian ini berdasarkan Nota Dinas Sekretaris BPPSDMKP Nomor 1126/BPPSDM.1/HP.510/IV/2026 tanggal 14 April 2026 tentang Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Triwulan I Tahun 2026 lingkup BPPSDM KP”

Keberhasilan capaian IK ini disebabkan oleh tidak ada temuan atau tindak lanjutnya telah tuntas. Tercapainya IK ini (tidak ada temuan pengawasan dari itjen) merupakan keberhasilan dari pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang menjadi titik kritis dari kegiatan yang ada di LPTK.

Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian IK ini adalah pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan antara lain komitmen pimpinan dalam percepatan temuan.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.000.000,- dengan realisasi penyerapan sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebesar Rp.0,- (belum ada penyerapan anggaran).

IK 2 : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 (delapan) indikator kinerja pelaksanaan anggaran, yaitu Revisi DIPA (10%), Devisiasi RPD (10%), Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (5%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), dan Capaian Output (25%).

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di bagi menjadi 4 (empat) antara lain : a) Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; b) Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$; c) Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau d) Kurang, apabila nilai IKPA < 70 . Nilai IKPA diambil dari nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI dalam aplikasi monev PA dengan alamat <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/>

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perencanaan Teknologi Kelautan Triwulan I Tahun 2026 target IK ini adalah nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK adalah sebesar 92,1. Penilaian capaian IK ini akan dilaksanakan pada triwulan II dan IV. Adapun progress sampai dengan saat ini adalah melakukan revisi ke 2 DIPA yang terbit pada 12 Februari 2026 yaitu melakukan revisi pemutakhiran rencana penarikan dana halaman III DIPA agar meminimalisir deviasi RPD/Halaman III DIPA sehingga diharapkan akan meningkatkan capaian IKPA.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.900.000,- dengan realisasi penyerapan sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebesar Rp.450.000,- (50%).

IK 3 : Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)

Nilai PM SAKIP Loka Perencanaan Teknologi Kelautan dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP LPTK merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP.

Target capaian IK ini pada Triwulan I Tahun 2026 adalah nilai Penilaian Mandiri SAKIP LPTK adalah sebesar 80. Capaian IK ini akan diukur pada triwulan IV atau periode tahunan. Adapun progres sampai dengan saat ini adalah telah tersusunnya dokumen perencanaan LPTK tahun 2026 yang meliputi: Perjanjian Kinerja, Manual Indikator Kinerja, Rencana Aksi, Rincian

Target, Matriks Peran hasil serta dokumen perencanaan dan evaluasi lainnya. Selain itu juga telah dilakukan Rekon Kinerja serta Reviu Laporan Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Februari 2026.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.000.000,- dengan realisasi penyerapan sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebesar Rp.0,- (belum ada penyerapan).

IK 4 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila $NKA > 90$;
- b. Baik, apabila $NKA > 80 - 90$;
- c. Cukup, apabila $NKA > 60 - 80$;
- d. Kurang, apabila $NKA > 50 - 60$;
- e. Sangat Kurang, apabila < 50 .

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2026, target IK ini adalah Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK sebesar 72. Pengukuran penilaian capaian IK ini akan dilakukan pada triwulan IV atau periode tahunan. Adapun progress sampai dengan saat ini Adalah melakukan pengisian capaian output pada aplikasi. IK ini tidak mempunyai dukungan anggaran spesifik, namun demikian hal ini tidak berpengaruh terhadap capaian kinerja IK tersebut.

IK 5 : Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

IK Indeks profesionalitas ASN Lingkup LPTK merupakan indikator yang dibentuk seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. IK ini diukur secara Semesteran. Berdasarkan Surat dari Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara No. 006//B BM.02.01/SD/C/2023 Tanggal 22 Mei 2023, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 dan Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi terjadi perubahan pengukuran indeks IP ASN sebagai berikut:

1. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi ASN (SIASN) pada Layanan indeks Profesionalitas ASN.
2. Penyesuaian instrumen pada dimensi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 meliputi : 1) Kualifikasi; 2) Kompetensi; 3) Kinerja dan 4) Disiplin

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Triwulan I Tahun 2026, target IK ini adalah nilai Indeks Profesionalitas ASN LPTK sebesar 83. Pengukuran IK ini akan dilaksanakan pada triwulan II dan IV atau periode semesteran. Adapun progress sampai dengan saat ini adalah melakukan updating data kepegawaian pada aplikasi my asn, pengisian SKP triwulan I tahun 2026 serta peningkatan kapasitas ASN LPTK melalui pelatihan mandiri atau *elearning* yang dilakukan pada aplikasi elearning.kkp.go.id/emilea maupun dari sumber lainnya.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.428.002.000,- dengan realisasi penyerapan sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebesar Rp.596.751.992,- (24,58%).

IK 6 : Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan yang akan dilaksanakan oleh LPTK. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat merepresentasikan kualitas PBJ di LPTK.

Nilai ini didapatkan dari hasil persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan pagu pengadaan satker. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2026, target IK ini adalah Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK sebesar 77%. Capaian IK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Capaian Kinerja IK 6 pada Triwulan I Tahun 2026

SK-1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan								
IK-6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%)								
Realisasi Triwulan I 2023 - 2025			Tahun 2026					Target Kinerja 2025-2029	
2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan TW I Tahun 2025-2026	Target 2029	% Capaian
-	-	100	77	77	100	129,87%	0,00%	84	119,05%

Pada Triwulan I Tahun 2026 capaian IK ini telah mencapai target yang ditetapkan, yakni Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK sebesar 100% dari target 77%, atau dengan presentase capaian sebesar 120%. Capaian ini berdasarkan Nota Dinas Sekretaris BPPSDM KP Nomor 1428/BPPSDM.1/PL.410/IV/2026 tanggal 13 April 2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan BPPSDM yang diumumkan pada SIRUP Triwulan I TA 2026.

Keberhasilan capaian IK ini adalah telah terumumkannya semua rencana umum pengadaan PBJ LPTK khususnya pasca revisi DIPA maupun POK sehingga pagu pengadaan pada SIRUP dapat sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran yang terbaru.

Kegiatan yang menunjang tercapainya IK ini diantaranya adalah koordinasi yang baik antara bagian perencanaan dan bagian pengadaan barang/jasa sehingga dapat bergerak cepat menyesuaikan inputan SIRUP pasca efisiensi/revisi anggaran.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.229.808.000,- dengan realisasi penyerapan sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebesar Rp.154.408.650,- (12,56%).

IK 7 : Proposal Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK (Proposal)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2026, target IK ini adalah Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK adalah sebanyak 1 (satu) buah Proposal. Progres sampai dengan saat ini adalah telah menyusun proposal inovasi pelayanan publik dengan judul SAMUDERA CERDAS yang berfungsi sebagai Solusi untuk meningkatkan

keselamatan, produktivitas, dan keberlanjutan ekosistem pesisir melalui sistem analitik cerdas yang adaptif dan berbasis kearifan lokal.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.624.000,- dengan realisasi penyerapan sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebesar Rp.750.000,- (28,58%).

IK 8 : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK (Nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2026, target IK ini adalah Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK sebesar 71. Adapun progress sampai dengan saat ini adalah melakukan pengelolaan arsip dinamis dan arsip inaktif. IK ini tidak mempunyai dukungan anggaran spesifik, namun demikian hal ini tidak berpengaruh terhadap capaian kinerja IK tersebut.

IK 9 : Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%)

Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LPTK merupakan layanan yang dilaksanakan oleh LPTK dalam menjalankan dukungan manajerial yang meliputi laporan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing rincian output antara lain:

1. Layanan BMN
2. Layanan Hubungan Masyarakat
3. Layanan Umum
4. Layanan Data dan Informasi
5. Layanan Perkantoran
6. Layanan Manajemen SDM
7. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
8. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
9. Layanan Manajemen Keuangan
10. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2026, target IK ini adalah ukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LPTK sebesar 100%. Capaian IK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Capaian Kinerja IK 10 pada Triwulan I Tahun 2026

SK-1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan								
IK-10	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%)								
Realisasi Triwulan I 2023 - 2025			Tahun 2026					Target Kinerja 2025-2029	
2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan TW I Tahun 2025-2026	Target 2029	% Capaian
100	100	100	100	100	100	100,00%	0,00%	100	100,00%

Pada Triwulan I Tahun 2026 capaian IK ini telah mencapai target yang ditetapkan, yakni persentase layanan dukungan manajemen internal LPTK sebesar 100% dari target 100%, atau dengan presentase capaian sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan bukti dukung yang telah dikumpulkan yakni tersedianya semua laporan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing layanan tersebut pada Triwulan I Tahun 2026 yang telah diupload pada tautan: https://drive.google.com/drive/folders/1I_3X9Zvk-TLnmlmXOtCWKBymFisLu1VC?usp=drive_link

Keberhasilan capaian IK ini adalah terjalannya komunikasi yang baik antara ketua tim kerja dengan penanggung jawab tiap-tiap layanan, adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan Layanan Dukungan Manajemen internal Satker LPTK

Kegiatan yang menunjang tercapainya IK ini diantaranya adalah adanya inventarisasi dan pendokumentasian kegiatan yang telah dilaksanakan pada tiap-tiap layanan dukungan manajemen internal tersebut dengan baik sehingga mempermudah dalam penyusunan laporan tersebut.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.399.441.000,- dengan realisasi penyerapan Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp. 33.007.426,- atau sebesar 8,26

3.3. Akuntabilitas Keuangan Triwulan I Tahun 2026

Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003).

Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut : (1) Pertanggungjawaban dana publik; (2) Penyajian tepat waktu; (3) Adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah. Pagu anggaran Triwulan I Tahun 2026 yang disediakan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) adalah sebesar Rp.

4.074.775.000,- yang terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 2.427.552.000,- dan belanja barang sebesar Rp. 1.647.223.000,-. Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA sampai dengan triwulan I tahun 2026 adalah sebesar Rp. 806.161.000,-. Adapun realisasi serapan anggaran sampai dengan periode Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 785.368.068,- atau dengan prosentase sebesar 19,27% dari total pagu anggaran tahun 2026 dan sebesar 97,42% dari RPD yang telah direncanakan. Pagu dan realisasi anggaran LPTK Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 8. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2026

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	RPD Halaman III DIPA	% terhadap pagu anggaran	% terhadap RPD
1	Belanja Pegawai	2.427.552.000	596.751.992	615.506.000	24,58%	96,95%
2	Belanja Barang	1.647.223.000	188.616.076	190.655.000	11,45%	98,93%
Total		4.074.775.000	785.368.068	806.161.000	19,27%	97,42%

Tabel 9. Pagu dan Realisasi Anggaran per Rincian Output (RO) Triwulan I Tahun 2026

RINCIAN OUTPUT		VOLUME	PAGU ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2376.FAN.ZZ1 PEMENUHAN PRIORITAS DIREKTIF PRESIDEN	1 Layanan	252.229.000	-	0,00%
2	2378.EBA.962 LAYANAN UMUM	1 Layanan	21.422.000	-	0,00%
3	2378.EBA.994 LAYANAN PERKANTORAN	1 Layanan	3.782.700.000	784.168.068	20,73%
4	2378.EBA.Z03 LAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI	1 Layanan	2.624.000	750.000	28,58%
5	2378.EBA.Z07 LAYANAN BMN	1 Layanan	450.000	-	0,00%
6	2378.EBC.Z10 LAYANAN MANAJEMEN SDM	21 Orang	450.000	-	0,00%
7	2378.EBD.Z25 LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	1 Layanan	7.000.000	-	0,00%
9	2378.EBD.Z27 LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN	1 Layanan	7.900.000	450.000	5,70%
TOTAL			4.074.775.000	785.368.068	19,27%

Tabel 10. Pagu dan Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja (IK) Triwulan I Tahun 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PAGU	REALISASI	(%)
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	86	7.000.000	-	
	2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (Nilai)	92	900.000	450.000	50,00%
	3	Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (Nilai)	80	7.000.000	-	
	4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (Nilai)	72	-	-	
	5	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	83	2.428.002.000	596.751.992	24,58%
	6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%)	77	1.229.808.000	154.408.650	12,56%
	7	Proposa Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK (Proposal)	1	2.624.000	750.000	28,58%
	8	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK (Nilai)	71	-	-	
	9	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%)	100	399.441.000	33.007.426	8,26%
	10	Keterbukaan Informasi Publik LPTK (Nilai)	70	-	-	
TOTAL				4.074.775.000	785.368.068	19,27%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan LPTK	1	Nilai PNBP LPTK (rupiah)	3.300.000	600.
	2	Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)	1	6.55
	3	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)	100	4.34
	4	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK (%)	≤ 0,5	34.7
	5	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (indeks)	82	25.0
	6	Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)	79	10.7
	7	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (nilai)	94	10.8
	8	Persentase Unit Kerja LPTK yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94	1.50
	9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	82	10.1
	10	Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LPTK yang diusulkan (Proposal)	1	2.90
	11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (nilai)	93,76	29.9
	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (nilai)	71	9.32
TOTAL				4.48

Berdasarkan hasil capaian realisasi kinerja dan keuangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada periode Triwulan I Tahun 2026, Target Kinerja yang disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja telah diakomodir dan didukung dengan ketersediaan anggaran serta dapat diserap dengan baik sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah ditetapkan. Pengalokasian anggaran yang tepat dapat mendorong kinerja pencapaian output yang baik. Dalam perjalanannya tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rincian Kertas Kerja Satker pada Triwulan I Tahun 2026 telah mengalami beberapa kali revisi/penyesuaian yaitu sebagaimana berikut:

1. DIPA Awal Nomor : SP DIPA – 032.12.2.403820/2026 tanggal 1 Desember 2025 dengan pagu DIPA sebesar Rp. 4.074.775.000,-
2. DIPA Revisi Ke-1 Nomor : SP DIPA – 032.12.2.403820/2026 tanggal 31 Desember 2025. Pada revisi adalah revisi DJA dimana LPTK terdapat mendapatkan pagu alokasi Pemenuhan

- Prioritas Direktif Rp. 252.229.000,- dengan mengambil pagu belanja barang sehingga secara total pagu DIPA tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. Rp.4.074.775.000,-
3. Revisi Ke-2 Nomor : SP DIPA –032.12.2.403820/2026 tanggal 12 Februari 2026. Pada revisi tersebut adalah revisi Kanwil DJPb dengan melakukan revisi pemutakhiran Halaman III DIPA dengan pagu DIPA Rp.4.074.775.000,-



BAB IV

PENUTUP

- 4.1. SIMPULAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- 4.2. UPAYA PERBAIKAN KEDEPAN
- 4.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI LKj

4.1. Simpulan Capaian Kinerja Organisasi

Pada Bab Akhir ini laporan ini kami simpulkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan menggunakan aplikasi Kinerjaku, pengukuran ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (key performance indicator/KPI) pada masing-masing perspektif secara keseluruhan kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Wakatobi termasuk baik, di mana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 107,5% Nilai tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan NKO pada Triwulan I tahun 2025 yang bernilai sebesar 106,66%. Nilai Kinerja Organisasi tersebut diperoleh dari pengukuran 3 Indikator Kinerja yang mempunyai target capaian pada periode ini. Dari 3 IK tersebut 1 IK mempunyai satu capaian Istimewa dan 2 IK mempunyai status capaian IK Baik. Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran LPTK pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp. 785.368.068,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.074.775.000,- atau persentase realisasi anggaran sebesar 19,27%. Dengan capaian tahun ini, diharapkan dapat ditingkatkan untuk periode kedepannya, khususnya pada indikator kinerja yang mempunyai output kendali tinggi sehingga nilai NKO dapat maksimal serta realisasi anggaran baik dari belanja pegawai maupun belanja barang dapat terserap sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah ditetapkan. Semua data dukung capaian indikator kinerja dalam laporan ini telah diunggah pada tautan: https://bit.ly/LPTKDaduk_Tw1_2026

Terkait dengan perkembangan penataan organisasi/UPT eks riset di lingkungan BPPSDMKP yang hingga kini masih belum selesai kami besar harapan agar segera ada kabar baik sehingga dapat meningkatkan semangat kinerja bagi segenap pegawai serta dapat memberikan sumbangsih/kontribusi nyata untuk masyarakat khususnya di bidang kelautan dan perikanan.

4.2. Upaya Perbaikan Kedepan

Upaya perbaikan kedepan yang perlu dilakukan guna meningkatkan kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan adalah dengan meningkatkan capaian kinerja pada beberapa Indikator Kinerja yang pada tahun sebelumnya (2025) mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun yang lalu yaitu pada IK-2) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK, IK-3) Penilaian Mandiri SAKIP LPTK, dan IK-5) Indeks Profesionalitas ASN LPTK. Ketiga IK tersebut harus lebih diperhatikan agar dapat meningkatkan nilai capaian kinerja organisasi

4.3. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKj

Adapun tindak lanjut atas rekomendasi LKj tersaji pada tabel berikut:

No	Rekomendasi LKj Tahun 2025	Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut
1	Melakukan monitoring terhadap semua target dan capaian indikator kinerja Triwulan I Tahun 2026	Semua target dan capaian indikator kinerja Triwulan I Tahun 2026 telah tercapai	Sudah di TL
2	Penyerapan anggaran sebaiknya mengacu RPD yang telah ditetapkan	Realisasi anggaran LPTK Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 97,42% dari RPD yang ditetapkan	Sudah di TL



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aliruddin**

Jabatan : Plt. Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Joni Haryadi D**

Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Loka Perekayasaan
Teknologi Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Aliruddin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	86
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (Nilai)	92,1
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (Nilai)	80
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (Nilai)	71,75
		5.	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	83
		6.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%)	77
		7.	Proposal Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK (Proposal)	1
		8.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK (Nilai)	71
		9.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%)	100
		10.	Keterbukaan Informasi Publik LPTK (Nilai)	70

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	4.074.775.000
TOTAL ANGGARAN LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN TAHUN 2026		4.074.775.000

Jakarta, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Loka Perekayasaan
Teknologi Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Aliruddin



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN**

JALAN IR. SOEKARNO NOMOR 3, DESA PATUNO, KECAMATAN WANGI-WANGI,
KABUPATEN WAKATOBİ, SULAWESI TENGGARA
LAMAM : www.kkp.go.id SUREL : lptk.wakatobi@gmail.com

SURAT TUGAS
NOMOR B.3/LPTK/KP.440/II/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA KINERJA
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN
TAHUN 2026

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Instansi Pemerintah (SAKIP) tata pemerintahan yang baik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara maka perlu adanya Tim Pengelolaan Kinerja;
- b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan SAKIP tersebut maka perlu menetapkan Surat Tugas tentang Tim Pengelola Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2026
- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memberi Tugas

Kepada : Daftar nama terlampir

- Untuk :
1. Melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2026 yang terdiri dari penanggung Jawab, Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Tugas ini.
 2. Tim Pengelola Kinerja Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2026 mempunyai tugas:
 - a. Penanggung Jawab
Memberikan pembinaan dan arahan terhadap kegiatan Pengelolaan Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2026
 - b. Ketua
Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pengelolaan kinerja serta mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi kelautan tahun 2026, sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Penaggung Jawab
 - c. Anggota
 - 1) Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kinerja serta melaksanakan pelaporan kinerja
 - 2) Mengumpulkan capaian kinerja dan bukti dukung atas capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama;
 - 3) Mengelola bahan-bahan yang diperlukan dalam penilaian mandiri SAKIP LPTK
 - 4) Mengelola Aplikasi kinerjajaku dan eSAKIP

1. Tim Pengelola Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2026, bertanggung jawab kepada Plt. Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Tugas ini dibebankan pada DIPA Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-032.12.2.403820/2026 tanggal 31 Desember 2025
3. Surat Tugas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Wakatobi, 7 Januari 2026
Plt. Kepala Loka Perekayasaan
Teknologi Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Aliruddin

2

Lampiran Surat Tugas
Nomor : B.3/LPTK/KP.440/I/2026
Tanggal : 7 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA KINERJA
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN
TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Aliruddin	Plt. Kepala LPTK	Penanggung Jawab
2.	M. Ahda Rifqi Hanief	Perencana Ahli Pertama/ Katimja	Ketua
3.	Amrin Hakim	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Anggota

Wakatobi, 7 Januari 2026
Plt. Kepala Loka Perekayasaan
Teknologi Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Aliruddin